

**ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
TURKI TERHADAP PENGAJUAN AKSESI SWEDIA
KEPADA NATO TAHUN 2022-2024**

Nawra Fakhirah

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21044010011@student.upnjatim.ac.id

Prihandono Wibowo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
prihandono_wibowo_wibowo.hi@upnjatim.ac.id

Submitted: October 23rd 2024 | Accepted: December 13rd 2024

ABSTRAK

Pada 24 Februari 2022, Rusia mengirimkan pasukan militernya untuk menginvasi Ukraina sebagai respon dari aksesinya Zelensky kepada presiden AS yakni Joe Biden agar mengizinkan Ukraina bergabung sebagai anggota dari North Atlantic Treaty Organization (NATO) di akhir tahun 2021. Invasi yang dilakukan oleh Rusia mendapatkan berbagai respon dari dunia internasional, dimana pada 05 Mei 2022 Swedia mengajukan aksesinya kepada NATO. Namun aksesinya Swedia harus tertahan karena Turki, salah satu negara anggota NATO menolak aksesinya tersebut karena Swedia diduga memberikan dukungan kepada Kurdistan Workers' Party (PKK), yakni sebuah organisasi separatisme Kurdi yang dianggap teroris oleh Turki. Hingga pada puncak pelaksanaan KTT NATO di Lithuania Juli 2023 lalu, secara mengejutkan Erdogan kemudian menyetujui aksesinya keanggotaan Swedia pasca diadakannya pertemuan pribadi bersama PM Swedia dan Sekjen NATO. Swedia telah resmi menjadi anggota NATO pada 07 Maret 2024. Penelitian ini akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Turki terkait aksesinya Swedia ke NATO menggunakan teori Foreign Policy Change milik Eidenfalk. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor internasional yang mempengaruhi perubahan keputusan Turki serta memanfaatkan konsep Windows of Opportunity, akan dijelaskan mengenai bagaimana Turki mampu memanfaatkan situasi geopolitik yang kompleks ini dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Turki; Swedia; NATO; Aksesinya; Perubahan Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

On February 24 2022, Russia sent its military forces to invade Ukraine in response to Zelensky's accession to US President Joe Biden to allow Ukraine join the North Atlantic Treaty Organization (NATO) at the end of 2021. The invasion carried out by Russia received various responses from the international community. On May 5 2022, Sweden submitted its accession to NATO. However, Sweden's accession had to be held back because Turkiye, one of the NATO member countries, rejected the accession because Sweden was suspected of providing support to the Kurdistan Workers' Party (PKK), a Kurdish separatist organization considered a terrorist by Turkiye. At the NATO Summit in Lithuania, July 2023, Erdogan surprisingly approved Sweden's accession after a private meeting with the Swedish Prime Minister and NATO Secretary General. Sweden officially became a member of NATO on March 7, 2024. This study will analyze the changes in foreign policy made by Turkiye regarding Sweden's accession to NATO using Eidenfalk's Foreign Policy Change theory. By identifying various international factors that influence Turkiye's decision-making changes and utilizing the concept of Windows of Opportunity, it will be explained how Turkey is able to take advantage of this complex geopolitical situation in achieving its national interests.

Keywords: Turkiye; Sweden; NATO; Accession; Foreign Policy Change

PENDAHULUAN

Dalam buku yang berjudul “World Politics: An Introduction” dituliskan definisi dari kebijakan luar negeri, yakni segala upaya yang dilakukan oleh negara yang dapat terlihat dari sikap beserta dengan aktivitasnya dalam mendapatkan keuntungan serta menyelesaikan adanya permasalahan global (Rosenau, Boyd, & Thomp, 1976). Pada tahun 2014, Rusia menganeksasi wilayah Krimea di wilayah Ukraina Timur yang dipimpin oleh kelompok separatis di bawah dukungan Putin (Iswara, 2022). Puncak konflik terjadi pada 24 Februari 2022, ketika Rusia mengirimkan pasukan militernya untuk menginvasi Ukraina sebagai respon dari pengajuan Zelensky kepada presiden Amerika Serikat Joe Biden, agar mengizinkan Ukraina bergabung sebagai anggota dari North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada akhir tahun 2021. Hal tersebut kemudian dipandang oleh Putin sebagai ancaman yang nyata kepada Rusia dan wilayah domestiknya.

Invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina tentu mendapatkan berbagai respon dari dunia internasional, utamanya negara-negara Barat yang langsung mengecam perbuatan tersebut. Respon juga diberikan oleh negara-negara tetangga di wilayah Eropa Timur yang berdekatan dengan Rusia seperti Swedia dan Finlandia, di mana pada tanggal 05 Mei 2022, empat bulan setelah dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, Swedia dan Finlandia menyatakan bahwa mereka secara resmi mengajukan permintaan untuk dapat bergabung menjadi anggota NATO (CNBC Indonesia, 2022). Menurut Owen Greene (2022) dalam *The Conversation*, bergabungnya Swedia pada NATO tentu merupakan hal mengejutkan bagi banyak pihak. Pasalnya sejak tahun 1812, Swedia mulai menerapkan netralitas ketika kalah dari Rusia dalam perang besar Napoleon. Netralitas Swedia bahkan semakin berkembang menjadi pondasi untuk

kebijakan luar negerinya yang aktif dalam melakukan promosi perdamaian serta keamanan internasional di wilayah Eropa dan dunia menggunakan diplomasi, pengaturan keamanan yang bersifat kooperatif, beserta penggunaan international organization sebagai alat (Greene, 2022).

Aksesi Swedia kepada NATO merupakan sebuah langkah konkret untuk mempertahankan keamanan domestik Swedia dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang semakin panas sejak Februari 2022 lalu. Tanpa adanya hambatan, pengajuan keanggotaan Finlandia telah diterima oleh seluruh anggota NATO sejak bulan April 2022, namun aksesi Swedia harus tertahan karena salah satu negara anggota NATO yakni Turki menolak menerima pengajuan keanggotaan Swedia. Sebagai negara pemegang hak veto, Turki dapat memberikan penolakan kepada calon negara anggota yang ingin bergabung kepada NATO. Alasan yang disampaikan oleh Presiden Erdogan melalui pidatonya pada akhir Mei 2022 lalu adalah karena Swedia diduga memberikan dukungan kepada Kurdistan Workers Party (PKK). PKK merupakan organisasi separatisme Kurdi yang dianggap teroris oleh pemerintah Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (The Economist, 2023). Penolakan Turki kepada Swedia semakin gencar setelah terjadi demonstrasi yang berujung pada peristiwa pembakaran kitab suci Al-Quran oleh ketua dari partai sayap kanan Swedia, Rasmus Paludan, di depan kedutaan Turki yang berada di Stockholm pada awal tahun 2023 (Reuters, 2023).

Sampai pada puncak pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Lithuania tanggal 11-12 Juli 2023 lalu, secara mengejutkan Erdogan kemudian menyetujui aksesi keanggotaan Swedia setelah diadakan pertemuan private bersama Perdana Menteri Swedia, Kristersson dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg selama 11 jam. Persetujuan Erdogan terhadap keanggotaan Swedia dalam NATO ini langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO pasca pertemuan antara tiga pihak tersebut selesai. Erdogan juga menyampaikan bahwa akan segera mendorong parlemen Turki untuk menyetujui dan meratifikasi aksesi Swedia kepada NATO secepatnya setelah anggota parlemen kembali dari reses di bulan Oktober 2023 (Purnama, 2023). Berdasarkan kepada laporan dalam official website milik NATO (2024) disebutkan bahwa Swedia telah resmi bergabung dan menjadi anggota baru dari NATO pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 07 Maret 2024. Dengan bergabungnya Swedia sebagai anggota baru menyusul Finlandia, NATO saat ini telah memiliki sebanyak 32 negara sebagai anggota resminya (North Atlantic Treaty Organization, 2024).

Dalam menganalisis studi kasus ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi utama. Adapun penelitian pertama yang relevan akan konteks dari studi kasus diatas adalah jurnal internasional berjudul "Turkey's Option for Finland and Sweden's NATO Membership Applications" oleh (Tuncer, 2022). Penelitian ini membahas mengenai beberapa opsi keuntungan yang dapat diambil oleh Turki dalam kasus pengangkatan veto yang diberikannya kepada aksesi Swedia terhadap NATO. Namun, tidak ada teori spesifik yang diaplikasikan dalam penelitian ini serta penjelasan yang digunakan masih bersifat umum.

Penelitian kedua yang juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kajian data

pada kasus diatas adalah skripsi dengan judul “Respon Turki Terhadap Akses Finlandia dan Swedia Dalam Keanggotaan NATO Sebagai Taktik Negosiasi Konsesi dan Kompensasi” milik (Lestari, 2023). Penelitian ini menganalisis alasan penolakan Turki terhadap akses Finlandia dan Swedia kepada NATO, menganalisis prosedur penerimaan anggota NATO, serta mengetahui strategi yang digunakan oleh Turki untuk melakukan perundingan dalam mengatasi konflik mengenai PKK dan Suku Kurdi Bersama Finlandia dan NATO.

Terakhir, terdapat penelitian lainnya yakni skripsi dari Hasbullah (2023) dengan judul “Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023”. Penelitian ini membahas mengenai apa dan bagaimana strategi yang digunakan oleh Swedia untuk dapat membuat Turki menyetujui aksesinya kepada NATO dan meratifikasinya menggunakan teori milik dua orang scholars yakni Carnevale dan Pruitt yakni teori *Strategies and Tactics in Negotiation* (Hasbullah, 2023).

Setelah meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, penulis akan mengambil penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Penulis akan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri yang ditekankan dalam sudut pandang Turki terhadap akses Swedia kepada NATO, terutama sudut pandang Presiden Erdogan sebagai pemimpin negara Turki. Faktor-faktor apa saja yang kemudian membuat Turki yang awalnya menolak menjadi menyetujui akses Swedia kepada NATO akan dianalisis oleh penulis menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Joakim Eidenfalk. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah, dengan demikian rumusan masalah yang didapatkan untuk penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Turki untuk menerima pengajuan keanggotaan Swedia di NATO setelah melakukan penolakan pada tahun 2022?”

KERANGKA BERPIKIR

Tabel 1. Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis

Merujuk pada buku berjudul “The International Relations Dictionary” yang ditulis oleh Jack C. Plano dan Roy Olton (1979), kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai tindakan atau strategi yang disusun oleh pemerintah suatu negara, yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi, untuk merespons negara, organisasi,

maupun aktor internasional lainnya dengan tujuan mencapai kepentingan nasional (Plano & Olton, 1979). Kebijakan luar negeri juga sering kali dilihat sebagai hasil dari berbagai pertimbangan domestik, dengan tujuan memilih opsi yang memberikan keuntungan semaksimal mungkin dan kerugian seminimal mungkin (Mochtar, 2000).

Foreign Policy Change merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk (2006) pada penelitiannya yang berjudul "Towards a New Model of Foreign Policy Change" mengenai pandangannya terhadap perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara. Teori ini dinilai Eidenfalk sebagai teori yang lebih terstruktur dan jelas dengan analisis yang ditekankan kepada proses perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dalam menghadapi berbagai macam isu-isu global. Eidenfalk juga menyatakan bahwa teorinya dibuat dengan lebih komprehensif dibandingkan dengan teori model-model sebelumnya, karena teorinya ini telah menggabungkan teori-teori relevan terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri untuk menghasilkan model baru yang lebih mendalam dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara (Eidenfalk, 2006). Dalam teorinya, Eidenfalk juga menyoroti beberapa aspek yang belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu, salah satunya adalah *sources of change*, di mana salah satu faktor dalam *sources of change* adalah faktor internasional. Dalam kasus perubahan luar negeri yang dilakukan oleh Turki terhadap pengajuan akses Swedia kepada NATO, faktor internasional dalam *sources of change* memainkan peran yang sangat penting. Eidenfalk menjelaskan bahwa pembuat kebijakan dapat menggunakan faktor internasional ini sebagai bahan pertimbangan dalam terjadinya proses perubahan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, faktor internasional yang ada dalam *sources of change* akan digunakan serta diaplikasikan dalam penelitian ini guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki (Eidenfalk, 2006).

Menurut pendapat Mearsheimer (1995) yang dikutip di dalam penelitian Eidenfalk (2006) tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara, sehingga negara memiliki hak untuk menentukan bagaimana ia bertindak karena negara adalah aktor utama dalam sistem internasional. Ini merupakan salah satu pandangan dari teori realisme dalam Hubungan Internasional. Namun, teori realisme tidak berhasil menjelaskan peningkatan peran lembaga lembaga internasional dan aktor non-negara (Eidenfalk, 2006). Meskipun negara tetap menjadi aktor utama di kancah internasional, globalisasi telah memberi ruang bagi aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC), dan individu untuk turut berperan dan memberikan pengaruh yang signifikan. Pandangan ini sejalan dengan teori interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane & Nye (2001) dalam penelitian milik (Eidenfalk, 2006). Eidenfalk juga menjelaskan bahwa ada empat macam indikator dari faktor internasional, indikator-indikator tersebut antara lain adalah faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non-negara.

Penelitian terbaru dari Grace Lumban Gaol (2024) berdasarkan kepada teori Foreign Policy Change milik Eidenfalk (2006) menjelaskan bahwa selain *sources of change*, ada pula faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam

kebijakan luar negeri, yaitu *windows of opportunity* atau jendela kesempatan (Gaol, 2024). Hal ini menjadi peluang bagi para aktor-aktor untuk memanfaatkan momentum guna melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Para aktor akan memperhatikan adanya *policy windows* yang muncul dari masalah atau tekanan yang ditimbulkan oleh *sources of change*, yang dalam kasus ini adalah faktor internasional. Selain itu, para aktor mungkin juga menyadari peluang ini secara mandiri, yang kemudian dapat memicu terjadinya perubahan kebijakan luar negeri menjadi keuntungan politik.

METODE

Mengutip pada jurnal penelitian milik Eng. Ilya Susanti (2016) penelitian didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terstruktur untuk mencari solusi atau jawaban atas fenomena, objek, atau masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Turki oleh Erdogan terkait pengajuan keanggotaan Swedia ke NATO setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Swedia dan Sekretaris Jenderal NATO di Vilnius Summit, Lithuania, pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode Kualitatif Deskriptif (Susanti, 2016).

Dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” Lexy J. Moloeng (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara lebih mendalam dengan menggunakan konsep atau teori yang tepat agar fenomena tersebut lebih mudah dipahami (Moleong, 2017). Sementara itu, Mukhtar (2013) menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif” bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang sedang diteliti (Mukhtar, 2013).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*Library Research*) dengan pengamatan tidak langsung. Penulis juga akan memanfaatkan *Secondary Sources*, seperti modul, artikel, jurnal ilmiah, buku, serta situs resmi pemerintah dan media massa, sebagai sumber data untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Global Dari Konflik Rusia dan Ukraina Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki

Dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022” disebutkan bahwa konflik yang terjadi antara dua negara dapat dilihat sejak tahun 1991, tepatnya saat Ukraina mendapatkan kemerdekaannya. Mulai dari sana Ukraina kemudian menjadi salah satu negara satelit Rusia yang mendapatkan banyak pengaruh dari politisi Rusia. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Ukraina mulai sangat korup dan pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Council of Europe, dilaporkan bahwa Ukraina masuk sebagai negara terkorup di Eropa setelah Rusia dengan peringkat 130 dari 180 negara berdasarkan data dalam *Corruption*

Perceptions Index (CPI) tahun 2017. Pada akhirnya masyarakat Ukraina membuat sebuah Gerakan revolusi dengan nama Revolusi Oranye (Orange Revolution) di ibu kota Ukraina yakni Kiev mulai dari tahun 2004 hingga 2005 (Adib, Inrakorniawan, & Stiarso, 2022).

Revolusi Oranye memiliki satu tujuan utama, yakni untuk menentang pengaruh dari politik Rusia yang masih mengakar di Ukraina sekaligus menuntut kepada pemerintah Ukraina agar dapat lebih melembagakan demokrasi (Gierczak, 2020). Sementara itu, penelitian dari Karatnycky (2005) menemukan bahwa Revolusi Oranye kemudian melahirkan Presiden Ukraina yang baru yakni Yushchenko, yang berhasil menjabat mengalahkan calon presiden pro-Rusia, Yanukovich (Karatnycky, 2005). Mengutip kepada Shullman (1998) yang dituliskan di dalam jurnal penelitian berjudul “Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022” ketegangan hubungan antara Ukraina dan Rusia juga disebabkan oleh adanya perbedaan etnis pada masyarakat Ukraina sendiri. Penduduk dari beberapa provinsi di Ukraina seperti Donetsk, Luhansk, dan Krimea menyebut diri mereka sebagai bagian dari Rusia karena masyarakat disana menggunakan Bahasa Rusia sekaligus memiliki kedekatan hubungan dengan Rusia. Masalah ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah Ukraina dengan mengadakan upaya Ukrainisasi dengan memaksa penggunaan Bahasa Ukraina kepada penduduk disana sekaligus demi mencegah hegemoni Rusia di jalur budaya berlanjut pada wilayah Ukraina (Adib, Inrakorniawan, & Stiarso, 2022).

Seiring dengan berjalannya waktu ketegangan yang berlangsung antara Ukraina dan Rusia semakin meningkat. Aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia pada 2014 menjadi konflik militer terbuka pertama dari kedua negara. Kondisi tersebut juga diperparah dengan bukti keterlibatan Rusia dalam Gerakan separatisme di Luhansk dan Donetsk (Riegert, 2014). Konflik kemudian pecah setelah Presiden Ukraina yang menjabat saat ini yaitu Presiden Zelensky mengajukan permintaan kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Biden agar Ukraina dapat bergabung dan menjadi anggota secara resmi dari pangkalan militer Barat yakni NATO setelah Rusia menyelenggarakan Latihan militer di dekat wilayah perbatasan Ukraina pada 2021. Pengajuan keanggotaan Ukraina ke NATO ini menyulut kemarahan Rusia sehingga pada 24 Februari, Rusia melakukan invasi militer ke wilayah Ukraina dimana konflik ini kemudian menyebabkan ketegangan politik secara global meningkat (Adib, Inrakorniawan, & Stiarso, 2022).

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah berdampak besar terhadap tatanan politik dunia, geopolitik global serta re-organisasi blok politik. Karena apabila dilihat lebih dalam, konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menyangkut kepada kedua negara itu saja, namun juga menyangkut kepada negara hegemoni lain yakni Amerika Serikat serta negara-negara lain sekutunya di Eropa dan NATO (Liu & Shu, 2023). Berbagai reaksi internasional juga terjadi sebagai dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Di kawasan Nordik (Eropa Timur), Swedia dan Finlandia yang terkenal dengan penerapan “netralitas” dalam kebijakan luar negerinya telah sepenuhnya berubah dengan mengajukan keanggotaan pada NATO di bulan Mei 2024. Tidak memihak awalnya dipandang sebagai jalan keluar yang paling tepat untuk dapat menghindari ketegangan dengan Rusia, namun invasi yang dilakukan oleh Rusia

kepada Ukraina menyebabkan pergeseran yang sangat besar bagi Swedia dan Finlandia setelah dukungan secara domestik melonjak untuk mereka mengajukan akses ke NATO (AP News, 2024).

Namun jalan Swedia untuk dapat menjadi anggota dari NATO harus terhambat, seperti yang dituliskan oleh Paul Levin (2023) dalam "Foreign Policy Research Institute" Erdogan menolak akses yang diajukan oleh Swedia karena menganggap bahwa Swedia merupakan tempat berlindung organisasi teroris Kurdistan Workers' Party (Teroris Kurdi) yang sudah menjadi musuh dari Turki sejak lama bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dijelaskan juga bahwa Amerika Serikat serta para sekutunya yang dalam hal ini adalah anggota NATO bekerja sama dengan Turki untuk memberikan insentif sebagai upaya untuk mempercepat ratifikasi Turki terhadap Swedia, salah satunya adalah bantuan gempa bumi yang diberikan tanpa syarat kepada Turki (Paul, 2023). Bergabungnya Swedia ke dalam NATO akan memperkuat posisi NATO di wilayah Lautan Baltik dari kemungkinan serangan Rusia. Pasukan militer serta peralatan tempur juga akan semakin mudah diangkut dengan kapal melalui wilayah Swedia ke Estonia, Latvia, dan Lithuania. Simon Koschut seorang profesor kebijakan dan keamanan internasional di Universitas Zeppelin, Jerman mengatakan bahwa Swedia memiliki lokasi yang strategis sehingga hal tersebut menjadi penting dan menarik bagi NATO (Eisele, 2023).

Karena penolakannya ini, Turki mendapatkan tekanan internasional dari negara-negara anggota NATO untuk segera meratifikasi keanggotaan Swedia, salah satunya adalah Amerika Serikat dimana juru bicara dari The White House, Jean-Pierre mengungkap Amerika Serikat menginginkan persetujuan Swedia dari Turki sesegera mungkin (Al Jazeera, 2023). Walaupun demikian, tekanan dari Amerika Serikat serta anggota NATO lainnya terhadap Turki untuk segera meratifikasi keanggotaan Swedia tidak terlalu banyak menimbulkan pengaruh. Hingga setelah melalui beberapa negosiasi dan pemenuhan persyaratan selama kurang lebih satu setengah tahun, Turki akhirnya meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO pada hari Kamis, 25 Januari 2024. Parlemen Turki mendukung akses Swedia dalam pengambilan suara yang diadakan pada hari Selasa. Di hari Kamis, dukungan parlemen Turki kepada keanggotaan Swedia sekaligus keputusan dari Presiden Erdogan yang menyetujui protokol akses Swedia kepada NATO diumumkan langsung melalui lembaran negara resmi Turki, hal ini sekaligus mengakhiri proses ratifikasi Swedia di negara tersebut (AP News, 2024).

Faktor global lain yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Turki adalah kelompok Teroris Kurdi sebagai Non-State Actor. Pada jurnal milik Ahmad Sahide (2013) dituliskan bahwa konflik yang terjadi antara Turki dengan masyarakat Kurdi telah berlangsung sejak tahun 1925, tepatnya ketika masa awal kemerdekaan Turki yang pada saat itu berada dibawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Konflik ini dimulai dari lahirnya "Sèvres Agreement" di tahun 1920, dimana salah satu isinya adalah perjanjian pemberian wilayah otonom kepada penduduk Kurdi dengan nama negara Kurdistan. Namun ternyata terdapat empat negara yang ikut masuk ke dalam wilayah cikal bakal berdirinya negara Kurdistan yakni Iran, Irak, Suriah, dan Turki sendiri, yang mana hal tersebut dapat menjadi masalah besar jika pendirian

negara Kurdistan tetap dilaksanakan (Sahide, 2013). Orang-orang Kurdi dengan populasi sebesar 20% di wilayah Turki kemudian mulai memperjuangkan hak-hak mereka dengan bergabung ke dalam partai politik Kurdi serta kelompok separatis yang mengutamakan terjadinya konflik bersenjata seperti Kurdistan Workers' Party atau PKK (Fajariyah, 2023).

Kurdistan Workers' Party atau PKK muncul atas respon dari perlakuan negatif pemerintah Turki terhadap orang-orang Kurdi yang merupakan suku minoritas di Turki. PKK sendiri berdiri pada 1978 dengan tujuan untuk mendapatkan hak-hak sipil serta politik yang setara bagi penduduk Kurdi di wilayah Timur Tengah, sekaligus untuk mendirikan negara Kurdistan yang merdeka. Di samping itu, penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Turki menyebabkan banyak terjadinya konflik bersenjata antara PKK dan pemerintah yang telah menewaskan puluhan ribu korban jiwa dalam beberapa dekade terakhir (Cho, 2023). Konflik yang berlangsung antar pemerintah Turki dengan PKK akhirnya menimbulkan masalah pada akses Swedia kepada NATO. Toleransi serta pemberdayaan Swedia kepada jaringan PKK adalah ancaman bagi Turki. Ketika negara-negara Eropa serta Amerika Serikat menganggap akses Swedia kepada NATO sebagai sebuah aksi keamanan yang kolektif terhadap agresi Rusia, Turki melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan baik secara politik maupun geopolitik (Outzen, 2023).

Dalam official website The Guardian, Miranda Bryant (2024) menuliskan bahwa dalam upaya memenangkan hati Presiden Erdogan, Swedia telah meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang Kurdi yang tinggal di Swedia, menjadikan pencari suaka sebagai sasaran dari penyelidikan Säpo (polisi keamanan Swedia), serta menutup rekening bank lembaga amal Kurdi di Swedia. Beberapa laporan juga mengatakan bahwa puluhan izin tinggal orang tidak bersalah telah dihentikan (Bryant, 2024). Pemerintah Swedia, diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Swedia yang pada waktu itu masih menjabat, Tobias Billstorm, menyampaikan melalui radio nasional pada November 2022 bahwa Swedia akan menjauhkan diri dari milisi Kurdi yakni YPG dalam upaya memperoleh persetujuan Turki untuk aksesinya kepada NATO. YPG dan cabang politiknya PYD dilihat oleh Turki sebagai bagian dari PKK yang turut melancarkan aksi separatisme di tahun 1980-an. Langkah ini dilakukan beberapa hari sebelum Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson melakukan perjalanan politik ke Turki untuk mengadakan negosiasi bersama Presiden Erdogan agar dapat mengizinkan Swedia bergabung dengan NATO (Reuters, 2022).

Erdogan menyampaikan kepada Swedia, bahwa Swedia harus dapat meningkatkan tindakan larangan terhadap berbagai kegiatan kelompok Kurdi di negara tersebut untuk dapat memperoleh ratifikasi dari Turki. Swedia kemudian mengesahkan undang-undang anti terorisme untuk dapat mencegah adanya masyarakat Swedia yang bergabung dalam organisasi teroris Kurdi. Meskipun demikian, Presiden Erdogan masih belum puas dan meningkatkan tuntutan yakni dengan permintaan untuk memasukkan ekstradisi lebih dari 100 orang ke Turki agar dapat diadili karena dianggap terlibat dengan PKK. Upaya Turki ini membuahkan hasil yang cukup signifikan, karena pada bulan Juli tahun 2023, Swedia menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada seorang pria Kurdi karena diduga

bahwa pria tersebut telah memberikan dana suntikan kepada PKK. Pada tanggal 10 Juli 2023, Erdogan merubah pikiran dengan menyatakan bahwa Turki menyetujui permohonan Swedia kepada NATO (Cho, 2023).

Masih mengutip pada penelitian yang dilakukan oleh Lauren Cho (2023) dikatakan bahwa terdapat beberapa alasan politik dibalik terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Swedia. Pertama, Turki dapat terus menekan pemerintah Swedia untuk menindak tegas kelompok teroris Kurdi dan segala aktivitas dibawah PKK. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi Turki terhadap teroris Kurdi mungkin telah melampaui batas wilayah Swedia. Seorang peneliti senior di Middle East Council on Global Affairs, Galip Dalay, menyampaikan jika ia memiliki keyakinan bahwa Turki dapat menekan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat untuk membuat sebuah tindakan yang lebih ketat terhadap kelompok lain yang juga dianggap sebagai teroris oleh Turki. Dalay juga mengatakan bahwa persetujuan Turki atas akses Swedia kepada NATO merupakan salah satu upaya strategis untuk dapat meningkatkan hubungan antara Turki dengan Uni Eropa, dalam rangka memperkuat kemungkinan bagi Turki agar dapat diterima dan bergabung secara resmi ke dalam blok yang sudah di idam-idamkan selama beberapa dekade tersebut (Cho, 2023).

Pengaruh Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Turki Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki

Pada Selasa, 23 Januari 2024 parlemen Turki pada akhirnya meratifikasi pengajuan akses keanggotaan Swedia kepada NATO setelah hampir satu tahun menolak dan menundanya. Anggota parlemen Turki menghasilkan sebanyak 287-55 suara sebagai dukungan untuk meratifikasi keanggotaan Swedia pada NATO setelah sebelumnya berhasil mendapatkan dukungan secara publik dari presiden Turki, yakni Recep Tayyip Erdoğan (The Defense Post, 2024). Salah satu anggota NATO yang merupakan negara super power yakni Amerika Serikat, diberitakan oleh (The Defense Post, 2024) memberikan pujian terhadap langkah baik yang diambil oleh parlemen Turki. Selama berjalannya penolakan Turki terhadap akses Swedia sendiri, Turki melalui Presiden Erdogan juga mencoba bernegosiasi bersama dengan Amerika Serikat terkait pembelian jet tempur Lockheed Martin dengan model F-16.

Negosiasi yang terjadi antara Turki dan Amerika Serikat sendiri telah berlangsung cukup lama. Dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai penjualan jet tempur ini merupakan permasalahan bilateral yang terjadi antara Turki dan Amerika Serikat, namun berhasil dibawa kembali oleh Turki pada saat muncul kesempatan bernegosiasi dari isu pengajuan akses Swedia kepada NATO. Dituliskan pada sebuah report milik Congressional Research Service (2024) Turki dan Amerika Serikat memiliki hubungan geopolitik yang cukup rumit dalam beberapa tahun terakhir. Turki sebagai middle power seperti layaknya negara kekuatan menengah lain sering mencari adanya “benefit” dari fenomena ataupun peristiwa yang terjadi dalam ranah global, terutama isu-isu yang menyangkut kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat salah satunya (Congressional Research Service, 2024).

Mengutip pada data dalam The Defense Spot (2024) dalam artikel berjudul “Washington Approves Sale of 40 F-16s to Turkey” dituliskan bahwa Turki melalui

Presiden Erdogan memberikan pernyataan mengenai alasan Turki menolak akses Swedia kepada NATO. Bagi Turki, Swedia dianggap telah menerima sekaligus menampung Kurdistan Workers' Party yang dianggap sebagai organisasi teroris yang sudah menjadi musuh dari Turki sejak lama (The Defense Post, 2024). Namun setelah Swedia berhasil merubah undang-undang anti terorismenya sesuai dengan permintaan Turki, Erdogan kemudian beralih untuk menagih janji Amerika Serikat mengenai isu penjualan jet tempur F-16. Turki telah mengajukan kesepakatan mengenai pembelian jet tempur F-16 kepada Amerika Serikat sejak tahun 2021. Namun keputusannya dalam menolak akses Swedia kepada NATO telah menjadi hambatan bagi Turki sendiri dalam mendapatkan persetujuan Amerika Serikat, yakni mengenai persetujuan penjualan jet tempur F-16 tersebut (BBC, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paul T. Levin (2023) Turki mengajukan kompensasi setelah sebelumnya telah dikeluarkan dari program produksi pesawat tempur gabungan F-35 milik Amerika Serikat pada tahun 2019 akibat melakukan transaksi pembelian sistem pertahanan anti-rudal S-400 kepada Rusia (Levin, 2023). Transaksi tersebut juga membuat Turki mendapatkan sanksi yang lumayan keras dari Amerika Serikat berdasarkan kepada Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) (Dost, 2023). Democratic Senator, ketua dari Senate Foreign Relations Committee di Amerika Serikat mengatakan bahwa persetujuan Amerika Serikat kepada permintaan Turki atas transaksi jet tempur F-16 tergantung kepada persetujuan Turki terhadap akses Swedia di NATO. NATO harus bisa melebarkan sayapnya untuk bisa melawan agresi yang dilakukan oleh Rusia (Al Jazeera, 2024).

Bahkan telah diberitakan juga dalam The Guardian (2024) bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken telah memimpin sebuah upaya diplomatik yang intensif untuk dapat meluruskan permasalahan ini. Antony mengatakan kepada Erdogan sebanyak tiga kali saat mereka berdua melakukan perjalanan ke Ankara pasca terjadinya gempa bumi di bulan Februari 2023 di Turki, bahwa tidak akan ada kesepakatan yang terjalin mengenai penjualan pesawat F-16 selama Turki terus memblokir akses Swedia kepada NATO (The Guardian, 2024). Melalui laporan dalam "The New Arab" Paul Iddon (2021) menuliskan bahwa Turki kekurangan jet tempur generasi 4,5 untuk dapat mempertahankan angkatan udaranya selama sisa dekade ini. Hal tersebut kemudian menjadi alasan yang kuat bagi Turki untuk membeli jet tempur F16 dari AS serta beberapa perlengkapan militer lain yang dibutuhkan, mengingat bahwa angkatan udara Turki merupakan salah satu yang terkuat dibandingkan dengan anggota anggota NATO lainnya (Iddon, 2021).

Masih mengutip pada website The New Arab, Turki merupakan operator F-16 terbesar nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Israel, dimana Turki saat ini telah memiliki sebanyak 270 jet tempur yang ikonik di angkatan udaranya. F-16 yang dimiliki oleh Turki sendiri adalah jet tempur F-16 dengan model Block 30/40/50 yang merupakan model lama. Sedangkan F-16 yang diinginkan oleh Turki dari AS merupakan jet tempur F-16 dengan model yang paling baru yakni F-16 Block 70, yang masuk ke dalam generasi 4,5. Jet tempur tersebut sangat diinginkan oleh Turki karena canggih serta tangguh (Iddon, 2021). Lockheed Martin, produsen dari F-16

mengatakan bahwa Block 70 dibuat dengan teknologi yang canggih, yang dikembangkan untuk pembuatan F-35 generasi kelima serta F-22 Raptor. Karena itu, 40 jet tempur F-16 Block 70 baru, beserta dengan 80 perangkat modernisasi militer akan sangat membantu Turki dalam menjaga armadanya tetap kokoh. Karena jika tidak berhasil mendapatkan F-16 Block 70, F-16 Turki dengan model Block 30 harus dihentikan produksi serta modernisasinya dalam beberapa tahun mendatang karena kerangka pesawatnya sudah usang dan sistemnya ketinggalan zaman, dimana hal ini akan sangat berdampak terhadap angkatan udara Turki dalam jangka panjang jika Turki tidak segera mendapatkan pengganti (Iddon, 2021).

Sampai pada Jumat, 26 Januari 2024, apa yang diinginkan oleh Turki akhirnya menjadi kenyataan (The Defense Post, 2024). Pada artikel lain dari The Defense Post (2024) yang berjudul “Turkey Signs Deal With US to Buy F-16 Warplanes” mengakhiri negosiasi yang sudah berlangsung selama beberapa bulan, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memberikan persetujuan kesepakatan penjualan jet tempur F-16 model Block 70 kepada Turki senilai \$23 miliar, tepat setelah Turki meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO (The Defense Post, 2024). Parlemen Turki sendiri telah berhasil meratifikasi keanggotaan Swedia kepada NATO pada hari Selasa, 23 Januari 2024 setelah Turki memblokir jalan Sweden untuk bergabung dengan NATO selama setahun lebih. Sebelumnya dilaporkan oleh NATO (2023) melalui Presiden Erdogan, Turki telah menyetujui aksesi Swedia kepada NATO setelah terjadi pertemuan private bersama Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stolterberg, dan Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson pada 10 Juli 2023 saat dilaksanakan Komisi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Lithuania (Vilnius Summit) (North Atlantic Treaty Organization, 2023). Erdogan juga mengatakan akan segera mengirimkan undang-undang mengenai ratifikasi Swedia di NATO kepada parlemen Turki untuk segera diratifikasi (Al-Jazeera, 2023).

Faktor Regional: Dampak Ambisi Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki

Berdasarkan data dalam penelitian Dastanta (2009) pada jurnal penelitian milik Yozar Qohari Bil Ikhsan (2019) ratifikasi terhadap perjanjian Maashtich membuat nama Masyarakat Ekonomi Eropa (ECC) berubah menjadi Uni Eropa (European Union). Perubahan nama ini dimaksudkan untuk dapat menegaskan identitas dari Eropa atas negara-negara anggotanya sekaligus memperkuat integrasi di wilayah Eropa. Pencapaian serta perkembangan yang berhasil dilakukan oleh Uni Eropa dalam berbagai bidang terutama ekonomi dan juga politik telah menjadikan Uni Eropa memiliki daya tarik yang besar sebagai sebuah organisasi regional oleh negara-negara di kawasan Eropa. Apabila berhasil menjadi salah satu anggota dari Uni Eropa, suatu negara tentu akan mendapatkan banyak keuntungan. Hal tersebut yang kemudian membuat Turki berambisi untuk dapat bergabung menjadi salah satu anggota dari Uni Eropa (Ikhsan, 2019). Sejarah mencatat bahwa Turki memang sudah sejak lama berpartisipasi ke dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Uni Eropa (Ikhsan, 2019).

Sebagaimana yang telah dituliskan pada Adhi Wardana (2017) Turki pernah

menjadi anggota dari Council of Europe di tahun 1949. Turki juga pernah menjadi salah satu negara pendiri dalam Organization for Economic Cooperation and Development di tahun 1961 juga Organization Security and Cooperation in Europe pada 1971. Dengan bergabung bersama Uni Eropa, Turki dapat lebih memperkuat posisinya secara militer maupun ekonomi dalam NATO. Menjadi anggota Uni Eropa juga akan membuat Turki memiliki daya tawar yang tinggi dalam menyelesaikan berbagai isu di wilayah Timur Tengah yang berkepanjangan. Namun sebelum bergabung, syarat yang diberikan oleh Uni Eropa tidaklah mudah karena banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi. Turki harus menyelesaikan beberapa permasalahan domestiknya terlebih dahulu, salah satunya seperti dalam hal politik. Uni Eropa melihat bahwa Turki memiliki beberapa permasalahan HAM terkait dengan mayoritas suku Kurdi (Wardana, 2017).

Ambisi Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa telah berlangsung selama beberapa abad sejak pertama kali diajukan pada 14 April 1987, lebih tepatnya saat Uni Eropa masih disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (ECC). Bahkan di tahun 2023, Turki pernah mengancam akan memutuskan hubungan dengan Uni Eropa setelah terjadi perdebatan akibat resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa, yang mengatakan beberapa kritik terhadap Turki mulai dari pemilu, masalah HAM, serta hubungan bilateral Turki dengan Rusia (Al

Jazeera, 2023). Resolusi ini dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Turki yang mengatakan bahwa resolusi tersebut memuat tuduhan dan prasangka yang tidak adil terhadap Turki. Masih mengutip pada data dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa juga mengancam kebijakan luar negeri Turki, salah satunya mengenai masalah pemblokiran keanggotaan Swedia di NATO (Al-Jazeera, 2023).

Pada hari Senin, 10 Juli 2023 saat dilaksanakannya Komisi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Lithuania, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg memberikan pengumuman kepada publik bahwa Presiden Erdogan telah memberikan persetujuan untuk meneruskan tawaran Swedia agar dapat bergabung bersama dengan NATO. Keputusan ini muncul setelah keduanya melakukan pertemuan bersama dengan Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson. Namun dalam kesempatan itu juga, Erdogan memberikan beberapa tuntutan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Swedia untuk mendapatkan persetujuan Turki secara resmi. Salah satu persyaratan yang diajukan adalah jika Uni Eropa menginginkan Swedia untuk dapat bergabung dengan NATO, maka Uni Eropa juga harus dapat mengizinkan Turki untuk masuk dan bergabung menjadi anggota (Deutsche Welle, 2023). Dilaporkan oleh CNBC (2023) Erdogan kemudian memberikan sebuah ultimatum kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk bisa “membukakan jalan” bagi Turki agar dapat bergabung ke dalam Uni Eropa (CNBC, 2023). Ini merupakan pertama kalinya Erdogan menghubungkan ambisi Turki untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dengan memanfaatkan upaya Swedia yang ingin menjadi bagian dari NATO. Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan bahwa Turki telah menunggu selama lebih dari 50 tahun untuk dapat masuk ke dalam Uni Eropa sedangkan semua anggota NATO merupakan anggota dari Uni Eropa. Jika negara-negara anggota Uni Eropa membukakan jalan bagi Turki untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa, maka Turki

juga akan ikut membuka jalan untuk Swedia bisa bergabung dengan NATO, sebagaimana yang telah dilakukan Turki kepada Finlandia (CNBC, 2023). Mengutip kembali pada pegawai dari kantor Presiden Erdogan di Turki menyampaikan bahwa mereka telah menghubungi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden melalui telepon pada hari Minggu untuk mengatakan kepada Amerika Serikat mengenai keinginan Turki dalam mendapatkan pesan dukungan yang kuat terhadap ambisinya untuk menjadi bagian dari Uni Eropa dari pertemuan KTT NATO di Lithuania Juli lalu (CNBC, 2023).

Pada salah satu artikel dari AP News yang berjudul, "Sweden Moves Closer to NATO Membership After A Deal With The Turkish President" disebutkan bahwa sebagai imbalan atas segala bantuan yang diberikan oleh Turki kepada NATO, Swedia setuju untuk mau membantu Turki dalam membuka hambatan-hambatan yang menghalangi jalan Turki agar dapat maju menjadi salah satu anggota dari Uni Eropa. Walaupun demikian Sekjen NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa hubungan antara Turki dengan Uni Eropa bukan menjadi persoalan NATO, melainkan masalah dari Uni Eropa itu sendiri. Namun dia menyebutkan bahwa apa yang telah terjadi dan disetujui oleh Swedia hari ini sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa merupakan upaya serta dukungan untuk dapat secara aktif menghidupkan kembali proses akses Turki ke dalam Uni Eropa. Selain itu PM Swedia, Ulf Kristersson bersama Sekjen NATO juga menyampaikan bahwa Swedia akan membantu Turki untuk dapat meningkatkan pengaturan terkait bea cukai dengan Uni Eropa sekaligus berupaya dalam memperoleh perjalanan bebas visa di Eropa bagi warga negara Turki. Sebelumnya Turki sendiri telah mencoba mencapai dua tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir namun sayangnya gagal dalam memenuhi standar blok perdagangan tersebut (Ritter, Fraser, & Cook, 2023).

Ambisi Turki untuk memanfaatkan akses Swedia kepada NATO dalam mengambil keuntungan geopolitik tanpa sadar telah menciptakan sebuah peluang atau kesempatan. *Windows of Opportunity* (jendela kesempatan) menurut Eidenfalk dan Doerer (2013) adalah momen-momen khusus ketika suatu negara bisa mengubah kebijakan luar negerinya secara signifikan. Seperti sebuah jendela yang terbuka sebatas lalu tertutup lagi, pada saat jendela itu terbuka, para pemimpin negara memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang besar. Kesempatan ini biasanya muncul ketika terjadi peristiwa penting seperti perang, perubahan pemimpin, atau krisis ekonomi. Saat itulah, para pemimpin suatu negara bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah lama mereka inginkan. Pada intinya *Windows of Opportunity* menunjukkan bahwa selain faktor internasional dalam *sources of change* seperti peristiwa-peristiwa global, pemikiran serta keputusan para pemimpin domestik juga sangat penting. Mereka bisa melihat krisis sebagai masalah atau sebagai peluang untuk membuat perubahan (Eidenfalk & Doerer, *The Importance of Windows of Opportunity For Foreign Policy Change*, 2013).

Dalam kasus Turki, Presiden Erdogan sebagai pemimpin tertinggi melihat kesempatan yang datang dari akses yang diajukan oleh Swedia untuk bisa bergabung menjadi anggota NATO. Kesempatan pertama yang datang adalah dengan memanfaatkan akses Swedia untuk dapat bernegosiasi mengenai permasalahan

teroris Kurdi yang mengakar di Swedia demi menjaga keamanan domestiknya (Inanc, 2022). Kesempatan kedua yang dimanfaatkan Turki pada kasus aksesinya Swedia terhadap NATO adalah pengajuan persyaratan tambahan berupa modernisasi Bea Cukai antara Uni Eropa dengan Turki, sekaligus peningkatan dukungan Swedia kepada Turki untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa (Ritter, Fraser, & Cook, 2023). Peluang lain yang dimanfaatkan Turki melalui negosiasi Swedia terkait aksesinya kepada NATO adalah mengenai kampanye Erdogan untuk dapat meningkatkan keamanan nasional di Turki. Penundaan aksesinya Swedia kepada NATO dan tuntutan yang diajukan Erdogan kepada Swedia dalam hal penanganan teroris Kurdi akan memberikan sebuah “image” pada pendirian Erdogan yang kuat kepada masyarakat Turki, yang mana hal tersebut penting bagi Erdogan untuk dapat memenangkan pemilu (Treisman, 2023).

KESIMPULAN

Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, awalnya menolak aksesinya Swedia ke NATO karena keterlibatan Swedia dalam mendukung kelompok yang terkait dengan Kurdistan Workers’ Party (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dengan adanya faktor internasional yang ada dalam *sources of change* sesuai dengan teori Eidenfalk yakni *Foreign Policy Change*, telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri Turki yang pada awalnya menolak pengajuan aksesinya Swedia kepada NATO. Turki, melalui Presiden Erdogan juga memanfaatkan adanya *windows of opportunity* atau jendela kesempatan yang muncul dari situasi geopolitik dan tekanan internasional pada isu aksesinya Swedia kepada NATO.

Beberapa *windows of opportunity* yang dimanfaatkan oleh Erdoğan adalah (1) Perubahan Geopolitik Global: Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 mendorong Swedia untuk mengajukan keanggotaan NATO sebagai langkah perlindungan terhadap ancaman Rusia. Turki melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk memajukan kepentingan domestiknya, terutama dalam hal penanganan PKK. (2) Negosiasi dengan Swedia: Turki menuntut agar Swedia memperketat undang-undang anti-terorisme secara domestik. Erdoğan juga menggunakan posisi veto Turki di NATO untuk memastikan tuntutan ini dipenuhi sebelum menyetujui aksesinya Swedia. Serta (3) Keuntungan Ekonomi dan Diplomati: Turki juga berhasil menegosiasikan keuntungan lain, termasuk dukungan Swedia untuk mempercepat isu modernisasi Bea Cukai Turki dengan Uni Eropa serta mendorong dukungan bagi aksesinya Turki ke Uni Eropa.

Pada intinya, perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap aksesinya Swedia ke NATO dipengaruhi oleh faktor internasional dalam *sources of change*. Erdoğan sebagai pemimpin negara Turki kemudian memanfaatkan situasi geopolitik tersebut untuk dapat memperkuat posisi Turki dalam negosiasi internasional sekaligus memenuhi kepentingan domestik dari Turki, khususnya terkait dengan isu keamanan nasional dan politik dalam negeri menjelang pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, I., Inrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2, 1-19.
- Al Jazeera. (2023, Juni 14). Turkey's Erdogan defies pressure over Sweden's NATO application. Diakses dari www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/14/turkeys-erdogan-defies-pressure-over-swedens-nato-application> pada Oktober 2024.
- Al-Jazeera. (2023, Oktober 23). Turkey's Erdogan submits Sweden's bid for NATO membership to parliament. Diakses dari www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/23/turkeys-erdogan-submits-swedens-bid-for-nato-membership-to-parliament> pada Oktober 2024.
- Al-Jazeera. (2023, September 20). Analysis: Is Turkey's bid for EU membership over? Diakses dari www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/analysis-is-turkeys-bid-for-eu-membership-over> pada Oktober 2024.
- Al-Jazeera. (2024, Januari 27). US approves sale of F-16 fighter jets to Turkey. Diakses dari www.aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/27/us-approves-sale-of-f-16-fighter-jets-to-turkey> pada Oktober 2024.
- AP News. (2024, Februari 27). Here's what to know about Sweden's bumpy road toward NATO membership. Diakses dari apnews.com: <https://apnews.com/article/sweden-hungary-nato-turkey-membership-defense-russia-a1ce06ef3da02b9c892e625efa138d35> Oktober 2024.
- AP News. (2024, Januari 26). Turkey formally ratifies Sweden's NATO membership, leaving Hungary as only ally yet to endorse it. Diakses dari apnews.com: <https://apnews.com/article/turkey-sweden-nato-ratification-expansion-3686af974e7f9238ee9698451e649ea9> pada Oktober 2024.
- BBC. (2024, Januari 27). US approves F-16 fighter jet sale to Turkey worth \$23bn. Diakses dari www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68115978> pada Oktober 2024.
- Bryant, M. (2024, Februari 07). 'Now we are not safe': Sweden's Kurds fear Nato deal has sold them out. Diakses dari www.theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/07/now-we-are-not-safe-swedens-kurds-fear-nato-deal-has-sold-them-out> pada Oktober 2024.
- Cho, L. (2023, Desember 01). Sweden's NATO Bid and Turkey-Kurdish Relations. Diakses dari yris.yira.org: <https://yris.yira.org/column/swedens-nato-bid-and-turkey-kurdish-relations/> pada Oktober 2024.
- CNBC Indonesia. (2022, 18 05). Resmi! Finlandia dan Swedia Mendaftar Gabun NATO. R Diakses dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220518143313-4-339861/resmi-finlandia-dan-swedia-mendaftar-gabung-nato/amp> pada Oktober 2024.
- CNBC. (2023, Juli 10). Erdogan says Turkey could approve Sweden's NATO membership if Europeans 'open way' to EU membership. Diakses dari

- www.cnb.com:
<https://www.cnb.com/2023/07/10/erdogan-turkey-could-approve-swedens-nato-membership-if-europeans-open-way-to-eu-membership.html> pada Oktober 2024.
- Congressional Research Service. (2024, September 26). Turkey (Türkiye): Major Issues and U.S. Relations. Diakses dari crsreports.congress.gov: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44000> pada Oktober 2024.
- Deutsche Welle. (2023, Juli 11). Approving Sweden Joining NATO, Erdogan Asks Türkiye to Join EU. Diakses dari www.dw.com/id: <https://www.dw.com/id/setujui-swedia-gabung-nato-erdogan-minta-turki-masuk-ue/a-66184145> pada Oktober 2024.
- Doeser, F., & Eidenfalk, J. (2013). The importance of windows of opportunity for foreign policy change. *International Area Studies Review*, 306-406.
- Dost, R. O. (2023, Juli 08). A looming US-Turkey F-16 deal is about much more than Sweden's NATO bid. Diakses dari www.atlanticcouncil.org: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/a-looming-us-turkey-f-16-deal-is-about-much-more-than-swedens-nato-bid/> pada Oktober 2024.
- Eidenfalk, J. (2006). Towards a new model of foreign policy change. *Australasian Political Studies Association Annual Conference, Australasian Political Studies Association*, 1- 14.
- Eisele, I. (2023, Juli 12). What can Sweden contribute to NATO? Diakses dari www.dw.com: <https://www.dw.com/en/what-can-sweden-contribute-to-nato/a-66203036> pada Oktober 2024.
- Fajariyah, F. A. (2023, November 01). Analisis Konflik Kelompok Kepentingan Kurdi dan Pemerintah Turki Tahun 2018-2023. Diakses dari dspace.uui.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47755/19323114.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada Oktober 2024.
- Gaol, G. L. (2024, Juli 15). Analisis Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Penerimaan Pencari Suaka Etnis Rohingya Pada Tahun 2015. Diakses dari repository.upnjatim.ac.id: <https://repository.upnjatim.ac.id/26118/> pada Oktober 2024.
- Gierczak, B. (2020, May). The Russo-Ukrainian Conflict. Diakses dari www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/349948624_The_Russo-Ukrainian_Conflict pada Oktober 2024.
- Greene, O. (2022, Mei 26). Sweden: A History of Neutrality Ends After 200 Years. Diakses dari theconversation.com: <https://theconversation.com/sweden-a-history-of-neutrality-ends-after-200-years-183583> pada Oktober 2024.
- Hasbullah, M. S. (2023). Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023. Diakses dari dspace.uui.ac.id: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48536> pada Oktober 2024.

- Iddon, P. (2021, November 02). Why Turkey wants new F-16 fighter jets. Diakses dari www.newarab.com:
<https://www.newarab.com/analysis/why-turkey-wants-new-f-16-fighter-jets> pada Oktober 2024.
- Ikhsan, Y. Q. (2019). Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Journal of International Relations*, 5, 1-5.
- Inanc, Y. S. (2022, Mei 29). Nato, PKK and Olof Palme: Turkey and Sweden's complicated history. Diakses dari www.middleeasteye.net:
<https://www.middleeasteye.net/news/sweden-turkey-nato-pkk-olof-palme-complicated-history> pada Oktober 2024.
- Iswara, A. J. (2022, Februari 08). Kenapa Rusia Invasi Ukraina di Crimea Tahun 2014, Sejarah dan Penyebab. Diakses dari internasional.kompas.com:
<https://internasional.kompas.com/read/2022/02/08/193000270/kenapa-rusia-invasi-ukraina-di-crimea-tahun-2014-sejarah-dan-penyebab?page=all> pada Oktober 2024.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. (1979). *The International Relations Dictionary*. England: Clio Press, Ltd.
- James N. Rosenau, G. B. (1976). In *World Politics: An Introduction* (p. 27). New York: The Free Press.
- Karatnycky, A. (2005, Maret 01). Ukraine's Orange Revolution. Diakses dari www.foreignaffairs.com:
<https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2005-03-01/ukraines-orange-revolution> pada Oktober 2024.
- Lestari, L. I. (2023). Respon Turki Terhadap Akses Finlandia dan Swedia Dalam Keanggotaan NATO Sebagai Taktik Negosiasi Konsesi dan Kompensasi. Diakses dari etd.umy.ac.id: <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/38371/> pada Oktober 2024.
- Levin, P. T. (2023, Maret 07). FPRI analysis of Turkey and NATO enlargement to Sweden and Finland. Diakses dari www.iffs.se:
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9bb54714a9974a4b95956edb254c6152ac3a907629b3419958023df515ec901eJmltdHM9MTcyOTAzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12211b12-3895-6468-0a0d0f9f39c3655e&psq=FPRI+analysis+of+Turkey+and+NATO+enlargement+to+Sweden+and+Finland&u=a1aH> pada Oktober 2024.
- Liu, Z., & Shu, M. (2023). The Russia–Ukraine conflict and the changing geopolitical. *China International Strategy Review*, 1-14.
- Mochtar, M. (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- North Atlantic Treaty Organization. (2023, Juli 10). NATO Secretary General welcomes Türkiye's decision to forward Sweden accession protocols to parliament. Diakses dari www.nato.int:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217015.htm pada Oktober 2024.

- North Atlantic Treaty Organization. (2024, Maret 07). Sweden officially joins NATO. Diakses dari [www.nato.int: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223446.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_223446.htm) pada Oktober 2024.
- Outzen, C. R. (2023, Februari 02). Sweden's Path to NATO Accession and Its 40-year PKK Problem. Diakses dari [jamestown.org: https://jamestown.org/program/swedens-path-to-nato-accession-and-its-40-year-pkk-problem/](https://jamestown.org/program/swedens-path-to-nato-accession-and-its-40-year-pkk-problem/) pada Oktober 2024.
- Paul, L. (2023, Maret 08). The Turkish Veto: Why Erdogan Is Blocking Finland and Sweden's Path to NATO. Diakses dari [www.fpri.org: https://www.fpri.org/article/2023/03/the-turkish-veto-why-erdogan-is-blocking-finland-and-swedens-path-to-nato/](https://www.fpri.org/article/2023/03/the-turkish-veto-why-erdogan-is-blocking-finland-and-swedens-path-to-nato/) pada Oktober 2024.
- Purnama, B. E. (2023, Juli 11). Turki Cabut Penolakan terhadap Upaya Swedia Jadi Anggota NATO. Diakses dari [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/internasional/595755/turki-cabut-penolakan-terhadap-upaya-swedia-jadi-anggota-nato](https://mediaindonesia.com/internasional/595755/turki-cabut-penolakan-terhadap-upaya-swedia-jadi-anggota-nato) pada Oktober 2024.
- Reuters. (2022, November 05). Sweden to distance itself from Kurdish groups in bid to join NATO. Diakses dari [www.reuters.com: https://www.reuters.com/world/europe/sweden-distance-itself-kurdish-groups-bid-join-nato-swedish-radio-2022-11-05/](https://www.reuters.com/world/europe/sweden-distance-itself-kurdish-groups-bid-join-nato-swedish-radio-2022-11-05/) pada Oktober 2024.
- Reuters. (2023, April 05). Why are Turkey and Hungary against Sweden joining NATO? Diakses dari [reuters.com: https://www.reuters.com/world/europe/after-finland-joins-nato-why-is-turkey-making-sweden-wait-2023-04-04/#:~:text=Russia's%20invasion%20of%20Ukraine%20in,way%20to%20ensure%20their%20security.](https://www.reuters.com/world/europe/after-finland-joins-nato-why-is-turkey-making-sweden-wait-2023-04-04/#:~:text=Russia's%20invasion%20of%20Ukraine%20in,way%20to%20ensure%20their%20security.) pada Oktober 2024.
- Riegert, B. (2014, Maret 29). Sejarah Perluasan NATO ke Eropa Timur. Diakses dari [www.dw.com: https://www.dw.com/id/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a_17528183](https://www.dw.com/id/sejarah-perluasan-nato-ke-eropa-timur/a_17528183) pada Oktober 2024.
- Ritter, K., Fraser, S., & Cook, L. (2023, Juli 10). Sweden moves closer to NATO membership after a deal with the Turkish president. Diakses dari [apnews.com: https://apnews.com/article/nato-membership-sweden-turkey-347ef8ba4ff2e31d522f4df7049cf1ba](https://apnews.com/article/nato-membership-sweden-turkey-347ef8ba4ff2e31d522f4df7049cf1ba) pada Oktober 2024.
- Sahide, A. (2013). Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1-7.
- Susanti, E. L. (2016). *Metode Penelitian*. Modul, 1-8. The Defense Post. (2024, Januari 24). Turkey Ratifies Sweden's NATO Membership After Protracted Delay. Diakses dari [thedefensepost.com: https://thedefensepost.com/2024/01/24/turkey-ratifies-sweden-nato/?_gl=1*2wwufl*_ga*MTY1NjI4NTg5NS4xNzI5MDAzMjEo*_ga_W7TS6SK2MX*MT_cyOTA3NzM4MC4oLjEuMTcyOTA3NzM5Ny4wLjAuMA..](https://thedefensepost.com/2024/01/24/turkey-ratifies-sweden-nato/?_gl=1*2wwufl*_ga*MTY1NjI4NTg5NS4xNzI5MDAzMjEo*_ga_W7TS6SK2MX*MT_cyOTA3NzM4MC4oLjEuMTcyOTA3NzM5Ny4wLjAuMA..) pada Oktober 2024.
- The Defense Post. (2024, Januari 29). Washington Approves Sale of 40 F-16s to Turkey. Diakses dari thedefensepost.com:

- https://thedefensepost.com/2024/01/29/us-f16-sale-turkey/?_gl=1*ho95gx*_ga*MTY1NjI4NTg5NS4xNzI5MDAzMjE0*_ga_W7TS6SK2MX*_MTcyOTAwMzIxMy4xLjAuMTcyOTAwMzIxMy4wLjAuMA.. pada Oktober 2024. The Defense Post. (2024, Juni 13).
- Turkey Signs Deal With US to Buy F-16 Warplanes. Diakses dari thedefensepost.com: <https://thedefensepost.com/2024/06/13/turkey-us-f16-deal/> pada Oktober 2024. The Economist. (2023, July 10). Why is Turkey blocking Sweden from joining NATO? Diakses dari economist.com: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2023/07/10/why-is-turkey-blocking-sweden-from-joining-nato> pada Oktober 2024.
- The Guardian. (2024, Januari 27). US approves \$23bn sale of F-16 war planes to Turkey. Diakses dari www.theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2024/jan/27/us-approves-23bn-sale-of-f-16-war-planes-to-turkey> pada Oktober 2024.
- Treisman, R. (2023, Mei 16). What Turkey's presidential election could mean for the U.S. and Europe. Diakses dari www.npr.org: <https://www.npr.org/2023/05/16/1176371637/turkey-election-erdogan-us-na-to> pada Oktober 2024.
- Tuncer, A. M. (2022). Turkey's Option for Finland and Sweden's NATO Membership Applications. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 1-5.
- Wardana, A. (2017). Upaya Pemerintah Turkiye Untuk Bergabung Dengan Uni Eropa. *Global Political Studies Jurnal*, 1-17.